

**MODEL ROOT CAUSE ANALYSIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri)**

Dian Praharaningtyas¹, Fatchan Achyani², Triyono³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: dpr.aratyas@gmail.com; fa185@ums.ac.id; tri280@ums.ac.id

Abstract: *Use of the Regional Government Information System (SIPD) as a form of regional government transparency in disclosing information to the public. How SIPD is implemented in regional financial management at the Wonogiri Regency Manpower Service is the focus of this research. The author uses qualitative research with the Root Cause Analysis model "5 Why Analysis", namely asking why five times or repeatedly until finding the root of the problem. The main technique used in data collection is conducting interviews with staff who are SIPD operators by making a list of questions for observation and documentation. The author's conclusion is that not all informants have the same root problems in implementing SIPD. There are 3 main factors that cause less than maximum problems, namely communication constraints, application constraints and human resource constraints.*

Keywords: *Regional Government Information Systems, Regional Financial Management, Root Cause Analysis, 5 Why Analysis*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia mengharuskan penerapan akuntansi akrual penuh dan Penerapan SIPD secara efektif adalah tujuan utama dalam mempermudah serta mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri khususnya pada Dinas Tenaga Kerja. Namun, observasi awal yang didapat dari lokasi penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penginputan kegiatan. Berdasarkan observasi awal inilah, pengelola SIPD menyatakan jika sebenarnya penerapan ini sudah efektif namun banyak kendala yang didapatkan dari sistem yang berbasis web ini. Fenomena yang muncul pada penerapan SIPD adalah masalah penggajian serta penyusunan seluruh tata kelola keuangan, baik RKPD maupun APBD. Memasuki tahun 2021 banyak terjadi masalah pada SIPD dalam proses penyusunan APBD. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan daerah dalam menggunakan sistem ini. Akibatnya, daerah dilematis dan bingung, sehingga pembayaran gaji terlambat dan eksekusi pada beberapa proyek serta kegiatan-kegiatan juga mengalami kendala dan terhambat.

Berbagai penelitian telah membahas mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai OPD di Indonesia, namun belum ada yang meneliti dengan menggunakan model root causes analysis penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya novelty ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah mengapa dalam penerapan SIPD kurang maksimal hingga kemudian menemukan solusi untuk menangani masalah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Root Cause Analysis* (Analisis Akar Masalah)

Root Cause Analysis merupakan suatu metode untuk membantu menjawab pertanyaan ‘apa yang terjadi?’, ‘bagaimana bisa terjadi?’, dan ‘mengapa itu terjadi?’. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang dinyatakan dalam bentuk alami, besaran, lokasi dan waktu akibat dari kebiasaan, tindakan dan kondisi tertentu yang harus diubah untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. *Root cause analysis* memberikan jalan keluar yang lebih baik, tidak sekedar "faktor A menyebabkan kejadian B", namun "Dengan mengubah faktor A, maka kemungkinan kejadian B dapat dikurangi atau bahkan dicegah." Mempelajari *root cause analysis* secara tepat merupakan kajian yang penting untuk diperkenalkan kepada para pemangku kebijakan agar dalam proses membuat kebijakan didasari atas solusi mengatasi permasalahan pokok.

Alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan RCA yaitu Analisis Pareto, “5 Mengapa” atau *5 Why*, *Brainstorming*, Diagram Alir (Pemetaan Proses), *Cause and Effect* Diagram, Diagram pohon, Bench-marking tentu setelah *Root Cause* ditemukan. Teknik yang paling sering digunakan adalah *The 5 Whys* dan *Fishbone* Diagram. *The 5 Whys* adalah teknik yang dikembangkan oleh Sakichi Toyoda untuk analisis akar masalah di pabrik Toyota. *Tools* ini menangani masalah dengan mengembangkan pertanyaan ‘mengapa’. Pertanyaan mengapa diajukan untuk mengetahui penyebab sebuah masalah. Setelah mengetahui penyebab, “mengapa” digunakan lagi untuk mengetahui penyebab dari penyebab tersebut dan seterusnya.

2.2. Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.

2.3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2022. Dengan melihat kondisi terkini dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 2021-2026.

2.4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD adalah sebuah bentuk sistem yang diciptakan sebagai wujud teknologi yang dimanfaatkan dan di realisasikan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan (Balqis & Fadhly, 2021). Salah satu output SIPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), suatu bentuk

akuntabilitas publik yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah daerah di Indonesia menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun untuk membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Ningsih, 2016). Seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (T Triyono, F Achyani, 2019). Faktor kunci yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi. Adanya sistem informasi (aplikasi/software) memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan mengurangi tingkat kesalahan (Farida et al., 2021). SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien (Dan et al., 2022).

2.5. Transparansi

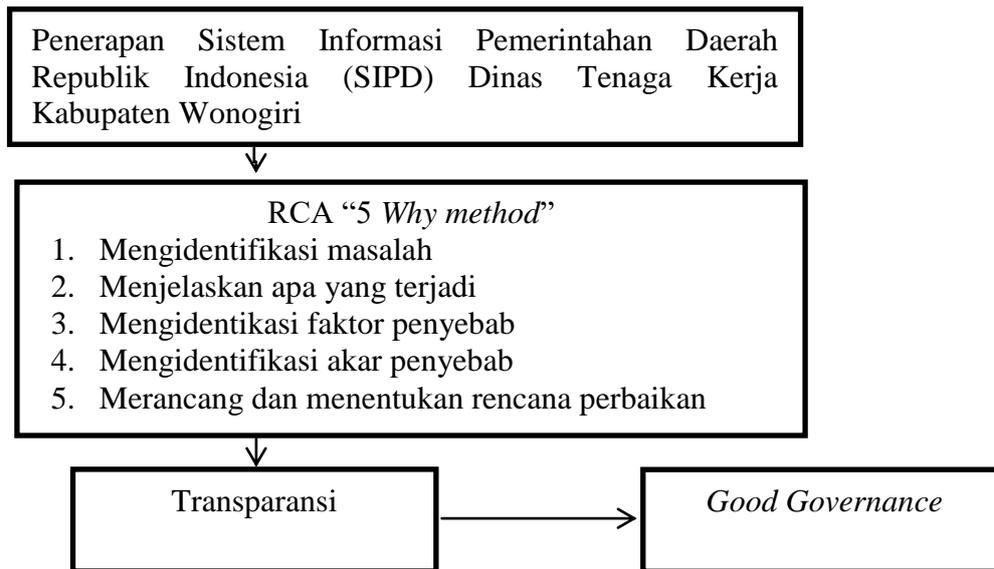
Transparansi atau biasa disebut keterbukaan, saat ini menjadi isu utama dalam pengelolaan pemerintahan, baik pengelolaan keuangan maupun informasi. Transparansi adalah salah satu bagian dari *good governance*. Dengan adanya transparansi bisa juga mengurangi tingkat kecurangan atau *fraud* yang mungkin terjadi di dalam pemerintahan. Tanpa transparansi, integritas dan kinerja yang baik tidak dapat dibuktikan dan mekanisme akuntabilitas tidak dapat ditegakkan (Tavares & da Cruz, 2020).

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja dan mengakses informasi, serta informasi, logika, alasan dan proses yang mengarah atau mempengaruhi keputusan harus sepenuhnya dipahami. Menurut Kristianten dalam Humaeroh et al., (2022), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2.6. Good Governance

Indonesia sudah mulai menerapkan *good governance* sejak zaman reformasi tetapi sampai saat ini penerapan *good governance* belum sepenuhnya berhasil. Sehingga diharapkan dengan SIPD di semua pemerintah daerah perlahan tapi pasti indonesia akan terwujud *good governance*. Seperti definisi *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik secara umum adalah prinsip baik yang mendasari proses dan pengurusan suatu perusahaan berdasarkan peraturan, hukum, dan etika bisnis (Achyani et al., 2021). Konsep *good governance* yang terdengar utopis ini sebenarnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara tiga aktor utamanya, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Praktik tata kelola yang baik memengaruhi sikap dan perilaku warga negara terhadap pemerintah (Mansoor, 2021). Sangat disayangkan banyak organisasi, struktur tata kelola masih belum cukup dan belum diyakinkan bahwa proyek teknologi informasi tidak hanya dikelola, tetapi juga diatur (Maciá Pérez et al., 2021) seperti SIPD yang dikelola dan diatur oleh negara melalui undang-undang.

2.7. Kerangka Berpikir



Gambar 1
Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *post-positivis*, dan digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam (kebalikan dari adalah eksperimental karena ada). Peneliti merupakan alat yang penting, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi (Rijal Fadli, 2021).

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma interpretif. Kuhn dalam (Almas, 2018) menyatakan bahwa paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu. Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

3.3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses wawancara dengan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja yang bertugas sebagai operator SIPD dari masing-masing bidang dalam penelitian ini ada 4 pegawai yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang diajukan pada saat penelitian. Selain wawancara atau interview, peneliti juga melakukan observasi

langsung terhadap penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penerapan SIPD di Pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan penelitian adalah pegawai yang bertugas sebagai operator atau operator SIPD SIPD pada masing-masing bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dimana ada 4 bidang yaitu bidang Sekretariat yang didalamnya ada bidang perencanaan, Hubungan Industrial, Pelatihan dan Produktivitas serta bidang Penempatan Tenaga Kerja, jadi sampel objek penelitian ini sebanyak 4 orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan jenis wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2018), wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang sudah memenuhi kategori *in-depth interview*. Wawancara dilaksanakan secara mendalam, namun dari segi pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Wawancara ini dimulai dengan lima belas (15) pertanyaan yang sama untuk semua informan kemudian setelah 15 pertanyaan terjawab, peneliti memberikan pertanyaan tambahan untuk dapat ditarik ke dalam metode *5 why root cause analysis*. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. Tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Disamping itu, peneliti juga dapat memperoleh informasi melalui keterangan dan pendapat dari informan.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terhadap penerapan SIPD serta permasalahan pengaplikasian SIPD yang ada, sehingga peneliti mengetahui gambaran awal mengenai SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri meliputi penginputan Rencana Kerja atau Renja.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berkaitan dengan penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

3.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis data penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *root cause analysis* berupa alat analisis “5 why analysis” untuk menemukan akar masalah dalam penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Adapun langkah-langkah menurut *Max Ammerman* dalam (Ikayanti & Prof. Gugus Irianto, 2017) ialah:

- a. Mengidentifikasi masalah
- b. Menjelaskan apa yang terjadi
- c. Mengidentifikasi faktor penyebab
- d. Mengidentifikasi akar penyebab
- e. Merancang dan menentukan rencana perbaikan
- f. Mengukur hasil evaluasi perbaikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Deskripsi dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti membutuhkan waktu 1 hari pada tanggal 22 Juni 2023. Penelitian ini bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, dengan beberapa pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan spontan untuk mendapat informasi dari informan mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan. Peneliti mewawancarai informan setelah itu mencatat hasil yang didapat dari informan untuk diketik kembali. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dilakukan peneliti selama 1 hari.

Dalam penjabaran hasil dari wawancara peneliti, peneliti menyebutkan identitas informan sebagai keakuratan data informan yang sesuai dengan pembahasan topik pada penelitian kali ini. Analisis akar masalah penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah studi empiris di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri seperti yang dibahas pada bab 2 adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah

Penelitian ini membahas mengenai penerapan SIPD, karena didalam pelaksanaannya ternyata ada berbagai masalah yang ditemukan antara lain kurang maksimalnya penerapan SIPD sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan. Selain itu dijumpai banyak program lokal yang menunya tidak ditemui dalam SIPD dan akibatnya seringkali terjadi penundaan pencairan anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris Budi Setiarso, SE bahwa SIPD mempunyai menu yang terlalu banyak sehingga membuat bingung saat penginputan. Oleh karena itu, peneliti mengambil prioritas masalah utama adalah penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

- b. Menjelaskan apa yang terjadi

Setelah masalah ditemukan, selanjutnya dilakukan prioritas masalah yaitu penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Menurut bapak Daniel Hari Budiman, SE daerah masih dalam penyesuaian dengan sistem yang baru dan belum tersinkronisasi dengan sistem keuangan daerah. Peneliti selanjutnya mencari informasi dan fakta terkait penerapan SIPD untuk memahami permasalahan yang sebenarnya. Peneliti nantinya akan melakukan wawancara kepada para informan yang bersangkutan dengan SIPD.

- c. Mengidentifikasi faktor penyebab

Sebelum mengidentifikasi akar masalah dari penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Peneliti harus menganalisis faktor apa saja

yang menyebabkan pelaksanaan SIPD kurang maksimal. Menurut Bapak Agung Purnomo, SH ada kesulitan dalam penginputan, server dari pusat yang tidak stabil serta jaringan internet petugas. Peneliti melihat jaringan internet menjadi salah satu masalah yang selama ini menjadi kendala yang menyebabkan penerapan SIPD kurang maksimal.

d. Mengidentifikasi akar penyebab

Penelitian ini menggunakan *5 why analysis* untuk menggali lebih dalam sampai pada akar permasalahan yang sebenarnya, akar penyebab bisa diketahui dengan cara bertanya “mengapa” sebanyak 5 kali atau secara berulang kali hingga sampai pada satu titik dimana jawaban pertanyaan telah menunjukkan suatu akar masalah (Ohno, 1988).

Dalam melakukan analisis akar masalah, peneliti melakukan wawancara kepada 4 pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas sebagai operator SIPD. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

1) Aris Budi Setiarso, SE

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Kurang optimal karena ada kendala dalam penginputan
Why 2	Karena petugas kesulitan menginput
Why 3	Karena petugas kurang menguasai
Why 4	Karena aplikasi yg kurang sederhana, terlalu banyak menu di dalamnya
Why 5	
Root cause	Karena aplikasi yg kurang sederhana, terlalu banyak menu di dalamnya

2) Agung Purnomo, SH

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena ada kesulitan dalam penginputan, server dari pusat serta jaringan internet petugas
Why 2	Karena semua saling berhubungan dalam penginputan jika server aplikasi dan jaringan petugas tidak mendukung untuk masuk dalam aplikasi membutuhkan waktu yang lama serta dengan menu aplikasi yang terlalu banyak
Why 3	Untuk server aplikasi karena mungkin bandwidth yang tidak cukup untuk mencakup seluruh petugas di Indonesia yang menyebabkan overload sedangkan jaringan internet ini karena kendala provider yang tidak stabil. <i>Bandwith</i> yang kurang menyebabkan aplikasi sulit untuk diakses atau lambat didukung dengan jaringan internet yang tidak cepat semakin membuat aplikasi sulit di akses
Why 4	Karena kalau <i>bandwith</i> tergantung kapasitasnya mbak dan itu gak tau pusat dalam penganggarannya bagaimana beli servernya yang bagaimana juga kurang tau, kalau provider tidak stabil karena mungkin faktor sinyal dan alam, untuk WiFi kantor kan kadang down kadang up tergantung telkomnya juga jaringannya sedang bagus atau tidak dan itu tidak menentu ketika jaringan bagus tapi server down kan sama saja gak bisa akses SIPD
Why 5	Karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga menyebabkan aplikasi tidak stabil.
Root cause	Karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga menyebabkan aplikasi tidak stabil. Kapasitas <i>bandwith</i> dan juga provider tidak stabil karena mungkin faktor sinyal dan alam, juga jaringannya sedang bagus atau tidak dan itu tidak

	menentu ketika jaringan bagus tapi server down tidak bisa akses SIPD
--	--

3) Tri Handayani, S.Sos

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena operator SIPD mengalami kesulitan dalam memasukkan data/angka
Why 2	Karena operator SIPD masih kebingungan dengan kode rekening atau anggaran
Why 3	Karena sebagai operator SIPD di bidang-bidang belum pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan SIPD dari BAPEDA, selama ini hanya mendapatkan bimbingan atau arahan dari bidang perencanaan di Sekretariat dan juga operator SIPD bukan orang akuntansi jadi tidak begitu menguasai atau memahami tentang anggaran sehingga terkadang salah input.
Why 4	Karena kami mempunyai job desk utama selain menjadi operator SIPD alias rangkap jabatan
Why 5	Karena terbatasnya pegawai yang ada.
<i>Root cause</i>	Karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada sehingga yang ditunjuk sebagai operator SIPD hanya pegawai yang masih muda di bidang-bidang. Operator SIPD belum pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan SIPD dari BAPEDA, selama ini hanya mendapatkan bimbingan atau arahan dari bidang perencanaan di Sekretariat dan juga operator SIPD bukan orang akuntansi jadi tidak begitu menguasai atau memahami tentang anggaran.

4) Daniel Hari Budiman, SE

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena masih dalam penyesuaian dengan sistem yang baru dan belum tersinkronisasi dengan sistem keuangan daerah, terlebih adanya perubahan indikator Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 tentang Kodefikasi Nomenklatur untuk Sub Kegiatan
Why 2	Karena perlu penyesuaian karena belum sepenuhnya data-data dari Kabupaten/Kota yang ditarik dari SIPD yang dikelola daerah dengan SIPD telah masuk semuanya atau dapat dikatakan belum sepenuhnya terintegrasi
Why 3	Karena pada Sub Kegiatan terdapat perubahan indikator yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Why 4	
Why 5	
<i>Root cause</i>	Karena pada Sub Kegiatan terdapat perubahan indikator yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- e. Merancang dan menentukan rencana perbaikan
- Setelah mengetahui akar masalah dari belum optimalnya penerapan SIPD, selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai tindakan perbaikan yang efektif untuk mengatasi kendala dalam penerapan SIPD agar bisa optimal sehingga pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri berjalan lancar. Adapun tindakan perbaikan menurut peneliti ialah sebagai berikut :
- 1) Pemerintah Pusat
 - a) Perlu diupayakan terselenggaranya bimbingan teknis kepada OPD dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Wonogiri karena pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal.
 - b) Memperbaiki atau menambah kapasitas server agar web mudah diakses.
 - c) Menu aplikasi yang rumit dibuat sederhana agar pengguna tidak mengalami kesulitan.
 - 2) Pemerintah Daerah
 - a) Mengadakan bimbingan teknis penerapan SIPD kepada semua operator SIPD di OPD bukan hanya pegawai di bidang perencanaan.
 - b) Memperkuat jaringan internet di OPD yang ada di kabupaten Wonogiri agar error yang terjadi saat input data berkurang.
 - 3) Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja)
 - a) Dinas Tenaga Kerja sebagai pengguna mempersiapkan semua data yang dibutuhkan seperti data Renstra dan Renja supaya lebih cepat dalam proses input data.
 - b) Pengguna dapat menginstal atau mengupdate aplikasi virus versi terbaru dan me-refresh aplikasi, serta menambah kapasitas jaringan internet.
 - c) Bidang perencanaan mengadakan pelatihan khusus secara internal ke operator SIPD bidang untuk meminimalisir kebingungan petugas dalam proses penginputan.
 - d) Mendampingi operator SIPD saat proses penginputan untuk mencegah terjadinya kesalahan memasukkan data, karena operator SIPD tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi sehingga kurang mengetahui tentang alur atau menu di aplikasi SIPD.
- f. Mengukur hasil evaluasi perbaikan.
- Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran hasil evaluasi perbaikan, melainkan hanya pada mencari akar masalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri) dan memberikan saran perbaikan. Dalam pengukuran evaluasi perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu dimiliki oleh peneliti hanya sebentar.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 4 pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang menjadi operator SIPD pada bidang masing-masing, terdapat beberapa akar masalah dari implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri). Adapun akar masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Akar masalah kurang maksimal penerapan SIPD, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dela Alfani (2022) yang menyatakan bahwa di instansi dalam prosesnya masih tidak memahami penggunaan SIPD secara menyeluruh. Hal ini diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap

instansi. Sehingga saat penginputan dilakukan, pegawai yang terkait dalam proses SIPD ini masih butuh bantuan pihak lain.

b. Aplikasi

Akar masalah kurang maksimal penerapan SIPD sesuai dengan teori oleh Tumija (2023) ada beberapa hambatan dalam penerapan SIPD a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIPD yang dirasa cukup rumit, mempunyai banyak menu yang membingungkan, alangkah lebih baik bila menu yang ada di SIPD lebih disederhanakan agar mudah dipahami oleh operator SIPD. Selain menu yang terlalu rumit, *website* SIPD yang sulit diakses juga server dari pusat karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga menyebabkan aplikasi tidak stabil serta jaringan internet operator SIPD yang sering mengalami *error*.

c. Sumber daya manusia

Akar masalah ketiga sesuai dengan teori oleh Nadya Balqis (2022) masih terjadi kendala di dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merasa belum siap akan penggunaan aplikasi yang berbasis web ini. Oleh sebab itu, peneliti menduga permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dalam mengelola aplikasi SIPD.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem informasi pemerintahan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Tetapi, dibalik harapan besar tentang sistem ini seperti yang dikemukakan diatas, pada kenyataannya belum ada sistem yang sempurna, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan pada sistem informasi pemerintahan daerah ini seperti temuan penelitian antara lain kendala komunikasi dimana pemerintah pusat maupun daerah kurang memberikan sosialisasi dan juga pelatihan khusus kepada operator SIPD.

Kendala kedua adalah aplikasi yang rumit, jaringan internet yang kurang memadai sehingga sering terjadi *error*, Solusi untuk kendala tersebut pemerintah pusat menyederhanakan menu SIPD agar petugas mudah menginput data. Untuk kendala jaringan internet bisa diatasi dengan menambah kapasitas server sesuai dengan kebutuhan website supaya meminimalisir *error* yang terjadi.

Terakhir kendala ketiga yaitu sumber daya manusia yang kurang kompeten karena keterbatasan pegawai yang dimiliki terkadang terjadi kesalahan input data karena kekurangtahuan mereka dalam alur akuntansi sehingga banyak pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan yang sebenarnya sangat disayangkan.

Di kendala yang ketiga ini sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi operator SIPD adalah yang bukan dibidangnya karena mereka juga mempunyai job desk utama selain menjadi operator. Operator SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 4 hanya 1 yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi sedangkan yang 3 lainnya tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Permasalahan ini bisa diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Kasubag Perencanaan juga mengambil tindakan yaitu mengakomodir pegawai untuk bekerja sesuai

dengan Tupoksinya. Struktur organisasi yang sesuai dan terarah mewujudkan keberhasilan implementasi SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis 5 *why* yang peneliti lakukan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini bermaksud mengetahui akar permasalahan kurang maksimalnya penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akar masalah pertama, kendala komunikasi dimana pemerintah pusat maupun daerah kurang memberikan sosialisasi dan juga pelatihan khusus kepada operator SIPD. Sebagai salah satu persiapan dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019, seharusnya Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Wonogiri memberikan pelatihan input perencanaan RKPD Tahun Anggaran 2022 melalui Aplikasi SIPD kepada masing-masing operator SIPD pada masing-masing bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Proses pelatihan bisa dengan memberikan bimbingan teknis berupa penjelasan tahap-tahap penginputan data melalui Aplikasi SIPD dan sekaligus bisa diimplementasikan langsung oleh para operator SIPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Karena dengan bimbingan khusus atau pelatihan diharapkan dapat memudahkan operator SIPD dalam pengisian/penginputan RKA, serta dapat meminimalisir berbagai kekeliruan yang akan terjadi pada saat penginputan data tersebut.
- b. Akar masalah kedua, kendala aplikasi. Aplikasi yang rumit, jaringan internet yang kurang memadai sehingga sering terjadi *error*. aplikasi SIPD yang didalamnya ada banyak menu membuat para operator SIPD di Dinas Tenaga Kerja kesulitan dalam menginput data karena menu serta alur yang terlalu banyak. Dalam kendala kedua selain menu yang rumit, operator juga terkendala dengan aplikasi yang sering error saat diakses dan jaringan internet yang tidak mendukung.
- c. Akar masalah ketiga, kendala sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi operator SIPD adalah yang bukan dibidangnya karena mereka juga mempunyai *job desk* utama selain menjadi operator. Operator SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 4 hanya 1 yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi sedangkan yang 3 lainnya tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Kendala sumber daya manusia ini menyebabkan sering terjadi kesalahan input dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bahasa akuntansi yang digunakan di aplikasi SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., Lovita, & Putri, E. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Sales Growth, and Capital Intensity on Accounting Conservatism (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 255–267.
- Almas, A. F. (2018). Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i1.1147>
- Dan, P., Daerah, B., Saputro, G. E., & Adi, S. (2022). *I I*, 2), .. 2(10), 3573–3588.
- Farida, I., Mulyani, S., Akbar, B., & Setyaningsih, S. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and

Organizational Culture in the Quality of Financial Information. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 222–236.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7809941>

- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 1–13.
- Ikayanti, H., & Prof. Gugus Irianto, S. M. P. D. A. C. (2017). Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) Kecurangan Akademik Pada Saat Ujian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Maciá Pérez, F., Berna Martinez, J. V., & Lorenzo Fonseca, I. (2021). Strategic IT alignment Projects. Towards Good Governance. *Computer Standards and Interfaces*, 76(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.csi.2021.103514>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Ningsih, S. (2016). The Antecedents of Non-Unqualified Opinions of Local Governments Financial Statements: A Study on Counties and Cities in East Java Province. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B003>
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- T Triyono, F Achyani, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>